

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Konsep pertumbuhan ekonomi merujuk kepada perkembangan kegiatan perekonomian suatu negara yang menyebabkan barang dan jasa yang di produksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi yang terjadi merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk menilai keberhasilan pembangunan ekonomi. Dalam kegiatan ekonomi yang sebenarnya, pertumbuhan ekonomi menunjukkan perkembangan ekonomi secara fisik yang terjadi di suatu negara. Seperti, penambahan jumlah dan produksi barang industri, perkembangan infrastruktur, penambahan jumlah fasilitas. Adapun yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi disuatu negara salah satunya adalah inflasi.

Inflasi merupakan salah satu fenomena ekonomi moneter yang dialami oleh semua negara termasuk di Indonesia. Inflasi yang rendah umumnya dibarengi suku bunga yang rendah, sehingga mendorong dunia usaha berinvestasi untuk peningkatan produksi yang akhirnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, jika inflasi yang tinggi menimbulkan ketidakpastian sehingga mengurangi insentif untuk investasi dan konsumsi juga dapat menjadi masalah bagi masyarakat berpendapatan rendah. Tidak dapat disangkal disepakati bahwa bahkan tingkat inflasi yang tinggi

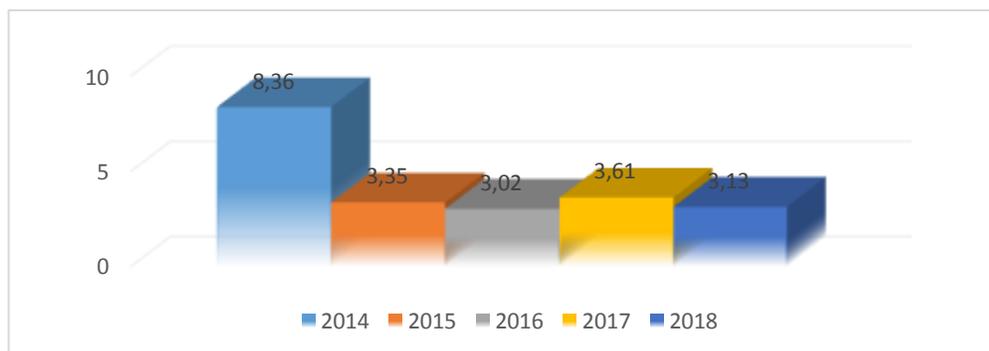
merusak pertumbuhan nyata (Cecchetti, 2000). Inflasi menurunkan pendapatan riil dan juga meningkatkan ketidakpastian. Terlepas dari dampak negatif inflasi terhadap ekonomi, secara umum disepakati bahwa tujuan utama kebijakan moneter bank terkemuka dunia adalah stabilitas harga (King, 1999 dan Blejer et al., 2000) dan bank sentral mengabdikan diri mereka pada inflasi rendah (Goodfriend, 2000) . Oleh karena itu, bank sentral mengadopsi inflasi sebagai tujuan utama kebijakan moneter mereka, dan menetapkan sasarannya untuk inflasi secara eksplisit dan implisit bila diperlukan (Abdul, 2006: 203).

Karakteristik tingkat inflasi yang kurang stabil di Indonesia menyebabkan deviasi yang lebih besar dari proyeksi inflasi tahunan oleh Bank Indonesia (dibanding deviasi antara realisasi inflasi dan target bank sentral di negara lain). Akibat dari ketidakjelasan inflasi semacam ini adalah terciptanya biaya-biaya ekonomi, seperti biaya peminjaman yang lebih tinggi di negara ini (domestik dan internasional) dibandingkan dengan negara-negara berkembang lainnya. Saat rekam jejak yang baik mengenai mencapai target inflasi tahunan terbentuk, kredibilitas kebijakan moneter yang lebih besar akan mengikutinya. Kurangnya kuantitas dan kualitas infrastruktur di Indonesia juga mengakibatkan biaya-biaya ekonomi yang tinggi. Hal ini menghambat konektivitas di negara kepulauan ini dan karenanya meningkatkan biaya transportasi untuk jasa dan produk (sehingga membuat biaya logistik tinggi dan membuat iklim investasi negara ini menjadi kurang menarik). Gangguan distribusi

karena isu-isu yang berkaitan dengan infrastruktur sering dilaporkan dan membuat Pemerintah menyadari pentingnya berinvestasi untuk infrastruktur negara ini.

Seperti yang telah diketahui bahwa inflasi merupakan faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi disetiap Negara. Secara teoritis keterkaitan antara inflasi dengan pertumbuhan ekonomi dalam teori pembangunan ekonomi dapat dikemukakan secara garis besar. Pada negara-negara berkembang Inflasi terjadi akibat kebijakan mengurangi tingkat pengangguran dan penciptaan effective demand dalam perekonomian. Karena output perekonomian negara-negara berkembang itu tidak mampu meresponse kenaikan employment rate dan effective demand tersebut, maka terjadi inflasi. Dengan kata lain berdasarkan pandangan ini maka inflasi di negara berkembang lebih merupakan fenomena aggregate supply (Basu, 2000; Hal 66-72).

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir yaitu dari tahun 2014 sampai tahun 2018 inflasi mengalami fenomena harga yang selalu berubah-ubah.



Gambar 1.1

Tingkat Inflasi Indonesia Tahun 2014-2018 (%)

Sumber : Badan Pusat Statistik

Pada grafik diatas menyajikan data Tingkat Inflasi yang didapat dari Badan Pusat Statistik, Tingkat Inflasi tertinggi di Indonesia yaitu pada tahun 2014 sebesar 8,36%. Tingginya tingkat inflasi pada tahun 2014 saat itu penyebabnya adalah karena ketika terjadi defisit anggaran pemerintah hampir melampaui batas minimum 3 persen dari PDB ditengah tingginya harga minyak dunia dan subsidi BBM pada tahun 2013 kembali memutuskan untuk menaikkan harga BBM bersubsidi. Pada Juni 2013 harga premium naik 44 persen dan hal ini memicu protes rakyat dan juga diterapkan pada waktu yang salah sekitar satu tahun sebelum pemilihan legislatif. Untuk mendukung segmen masyarakat yang miskin, pemerintah melanjutkan program pemberian uang tunai langsung. Namun inflasi naik menjadi 8,36 persen pada akhir tahun 2014.

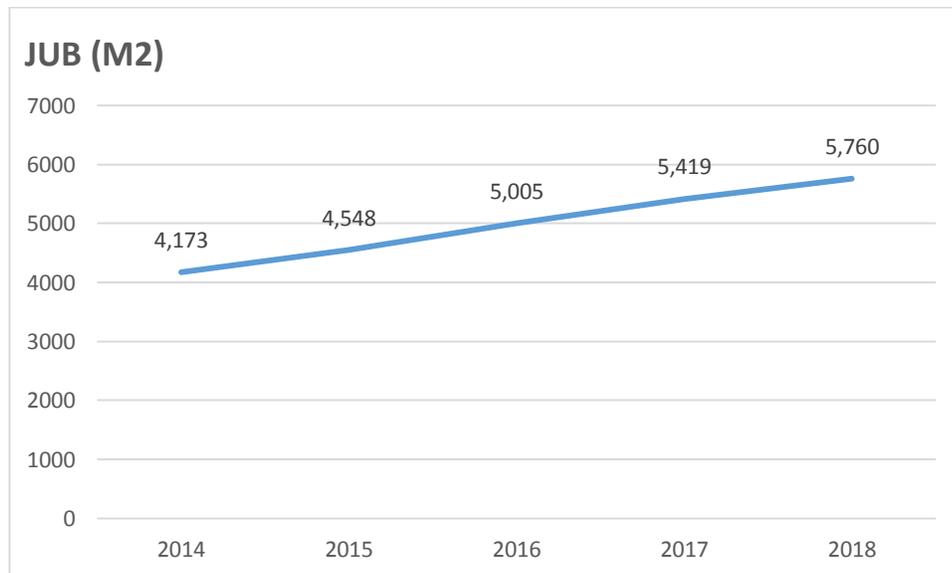
Dengan adanya defisit anggaran belanja pemerintah, biasanya pemerintah lalu mencetak uang sehingga menambah jumlah uang beredar. Sebagai akibatnya terjadi peningkatan dalam permintaan akan barang dan jasa dan mengakibatkan harga barang-barang naik. Dengan naiknya harga barang dan jasa, maka nilai uang turun dan masyarakat terpaksa membayar sejumlah barang yang sama dengan harga yang lebih tinggi, sehingga sesungguhnya pendapatan riil mereka menurun.

Untuk menghitung Inflasi tersebut digunakan angka indeks yaitu Indeks Harga Konsumen. Adapun yang melatarbelakangi perkembangan penghitungan inflasi di Indonesia adalah perubahan pola konsumsi masyarakat akibat perubahan teknologi, perilaku pendapatan dan selera, terjadinya krisis sehingga perlu penyesuaian tahun dasar, perkembangan jenis serta kualitas barang dan jasa, dan adanya perubahan

kemajuan pasar, outlet maupun supermarket. Dalam perhitungan harga komoditas, ukuran yang digunakan adalah rata-rata aritmatik. Tetapi komoditas lain seperti beras, minyak goreng, bensin dan sebagainya digunakan rata-rata geometri.

Berdasarkan penelitian terdahulu ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi inflasi secara signifikan diantaranya uang beredar, nilai tukar, dan pengeluaran pemerintah. Faktor ini dapat menjadi penyebab perubahan kondisi perekonomian di suatu Negara. Jumlah uang beredar merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi inflasi. Dalam bentuknya yang paling sederhana, jumlah uang beredar adalah jumlah uang yang beredar selama periode waktu tertentu. Peningkatan jumlah ini menyebabkan kenaikan harga, dengan kata lain, inflasi, dengan meningkatkan pengeluaran konsumsi dan pengeluaran investasi. Sehubungan dengan pengaruh inflasi pada pertumbuhan ekonomi, ekonom yang berbeda menyarankan bahwa ia mungkin memiliki efek positif dan negatif. Sementara beberapa ekonom yang sebagian besar adalah anggota pandangan Keynes, berpendapat bahwa inflasi mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara positif. Beberapa ekonom yang merupakan anggota pandangan Neoklasik menyarankan bahwa inflasi mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara negatif. Ketika pertumbuhan ekonomi memasuki proses regresi, jumlah uang, yang merupakan pendapatan masyarakat, juga menurun. Ketika pengeluaran berkurang sebagai akibat dari pengurangan uang, jumlah konsumsi dan investasi juga berkurang. Kelanjutan produksi dan investasi tergantung pada permintaan. Ketika permintaan menurun atau berhenti sebagai akibat dari penurunan

tingkat pendapatan, produsen tidak dapat menjual produk dan layanan mereka. Dalam keadaan ini, mereka harus mengurangi atau menghentikan tidak hanya produksi, tetapi juga investasi mereka.



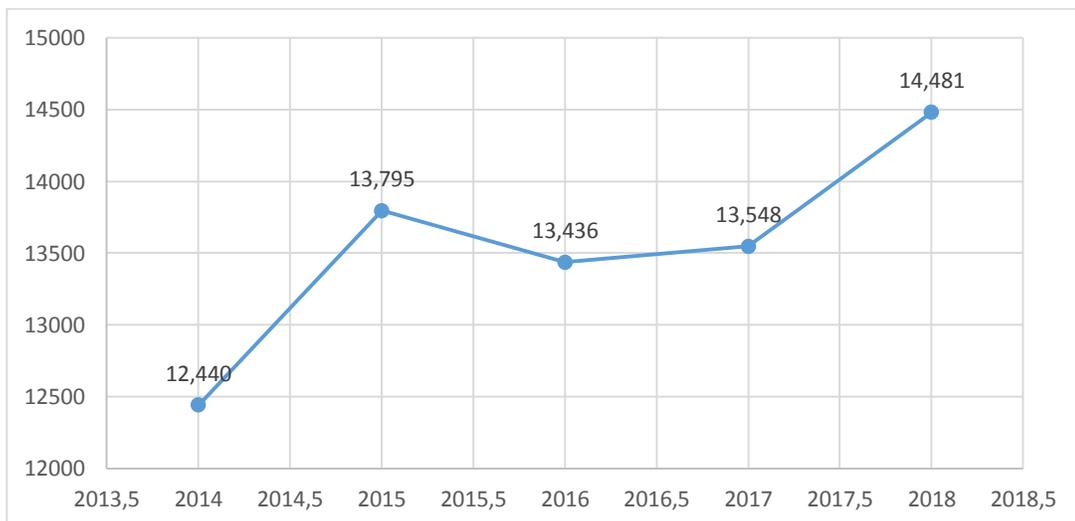
Gambar 1.2
Perkembangan Jumlah Uang Beredar di Indonesia
Tahun 2014-2018 (Triliun Rupiah)

Sumber: Bank Indonesia

Pada gambar diatas dapat diketahui bahwa lima tahun terakhir perkembangan uang beredar di Indonesia semakin meningkat. Pada tahun 2018 adalah tingkat uang beredar yang paling tinggi. Menurut pejabat Bank Indonesia, jumlah uang beredar pada tahun 2018 naik diperkirakan karena banyaknya agenda politik yang akan menstimulus kegiatan ekonomi khususnya konsumsi.

Kemudian faktor yang kedua adalah Nilai Tukar, dimana nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing berpengaruh pada inflasi. Nilai tukar rupiah selalu rentan

mengalami depresiasi terhadap mata uang asing. Pengaruh depresiasi nilai tukar rupiah pada akhirnya akan berpengaruh terhadap variabel makro lainnya seperti inflasi dan BI rate. Sebagai bank sentral di Indonesia, Bank Indonesia mempunyai satu tujuan yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai tukar rupiah. Kestabilan ini mengandung dua aspek yaitu kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa serta kestabilan terhadap mata uang negara lain. Aspek-aspek kestabilan terhadap mata uang negara lain tercermin pada perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain, sementara kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa tercermin pada perkembangan laju inflasi (Bank Indonesia, 2016). Nilai tukar yang digunakan dalam studi ini adalah nilai tukar rupiah terhadap US Dollar Amerika. Perkembangan nilai tukar rupiah terhadap US Dollar Amerika terus mengalami fluktuasi, seperti terlihat pada gambar 1.3.



Gambar 1.3
Perkembangan Nilai Tukar di Indonesia
Tahun 2014-2018 (Rp/US\$)

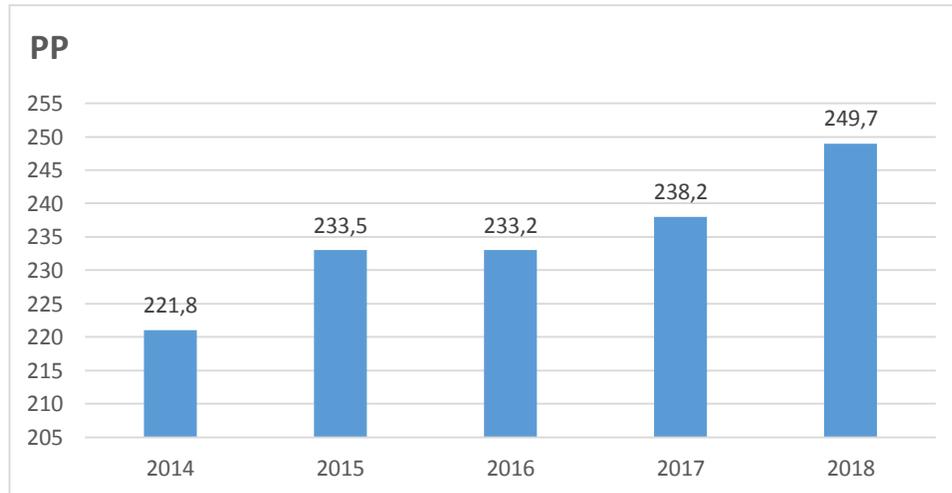
Sumber : Bank Indonesia, 2018

Nilai tukar rupiah terhadap US Dollar Amerika dari tahun 2014 sampai tahun 2018 mengalami depresiasi yang tinggi melebihi 10.000 yaitu pada tahun 2014 sebesar 12.440 dan tahun 2015 sebesar 13.795. Dan pada tahun 2016 mengalami penurunan tidak terlalu jauh dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 13.436. Pada tahun 2017 dan 2018 kembali mengalami depresiasi yang tinggi yaitu sebesar 13.548 pada tahun 2017 dan 14.481 di tahun 2018.

Berdasarkan gambar diatas bisa dilihat bahwa 5 tahun terakhir ini rupiah semakin melemah dimana pada tahun 2018 tembus Rp14.000. Jika dilihat pada tahun 2014 dolar AS berada di Rp12,440. Kemudian dolar AS terus menguat hingga menyentuh Rp13.795 pada tahun 2015.

Faktor lain yang ketiga yang mempengaruhi inflasi adalah Pengeluaran Pemerintah. Pengeluaran pemerintah merupakan salah satu komponen kebijakan fiskal yang bertujuan untuk laju investasi, meningkatkan kesempatan kerja, memelihara kestabilan ekonomi dan menciptakan distribusi pendapatan yang merata melalui belanja Negara baik itu belanja rutin maupun belanja pembangunan. Belanja pemerintah merupakan penentu posisi permintaan agregat, apabila pemerintah memangkas belanja pemerintah, permintaan agregat akan turun yang akan menekan produksi dan lapangan kerja dalam jangka pendek. Hal ini melibatkan bank sentral yang dapat bertindak guna memperluas permintaan agregat terkait kebijakan moneter. Apabila optimisme melanda, rumah tangga dan perusahaan-perusahaan meningkat

belanja, hasilnya adalah permintaan agregat meningkat, produksi bertambah dan munculnya tekanan inflasi.



Gambar 1.4
Perkembangan Pengeluaran Pemerintah di Indonesia
(Triliun Rupiah)

Sumber: Badan Pusat Statistik

Pada gambar 1.4 dapat diketahui bahwa perkembangan pengeluaran pemerintah lima tahun terakhir mengalami fluktuasi dimana pengeluaran tertinggi terjadi pada tahun 2018. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani memastikan anggaran tersebut akan diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan.

Berdasarkan data dan adanya hasil penelitian terdahulu yang tidak konsisten maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan mengembangkan serta mengkaji ulang variabel-variabel yang diduga mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Inflasi di Indonesia. Penelitian ini mengangkat tiga variabel bebas yaitu Jumlah Uang

Beredar, Nilai Tukar, dan Pengeluaran Pemerintah. Untuk variabel terikatnya yaitu Inflasi.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ **ANALISIS INFLASI DI INDONESIA TAHUN 2008-2018**”

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan, maka identifikasi masalah yang dapat diambil sebagai sebagai dasar kajian dalam penelitian yang dilakukan yaitu :

- 1) Bagaimana pengaruh Jumlah Uang Beredar, Nilai Tukar, dan Pengeluaran Pemerintah secara parsial terhadap Inflasi di Indonesia tahun 2008-2018?
- 2) Bagaimana pengaruh Jumlah Uang Beredar, Nilai Tukar, dan Pengeluaran Pemerintah secara bersama terhadap Inflasi di Indonesia tahun 2008-2018?

1.3 Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengetahui bagaimana pengaruh Uang Beredar, Nilai Tukar, dan Pengeluaran Pemerintah secara parsial terhadap Inflasi di Indonesia tahun 2008-2018
- 2) Untuk mengetahui bagaimana pengaruh Uang Beredar, Nilai Tukar, dan Pengeluaran Pemerintah secara bersama terhadap Inflasi di Indonesia tahun 2008-2018

1.4 Kegunaan Hasil Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan adalah :

1) Bagi Penulis

Dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan baik secara teoritis maupun empiris, khususnya mengenai masalah inflasi yang terjadi di Indonesia

2) Bagi Pemerintah

Dapat menjadi referensi dalam menetapkan suatu strategi atau kebijakan guna mengendalikan ekonomi di Indonesia

3) Bagi Akademis

Dapat menambah kelengkapan studi empiris dan menjadikan masukan atau acuan bagi peneliti lain yang hendak melaksanakan penelitian.

4) Bagi Pembaca

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan informasi mengenai jumlah uang beredar, nilai tukar, pengeluaran pemerintah, dan inflasi. Dan dapat menjadi acuan dalam melaksanakan penelitian selanjutnya.

1.5 Lokasi dan Jadwal Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian ini dilaksanakan di Tasikmalaya melalui pengambilan data dari website Badan Pusat Statistik yang menyajikan data valid mengenai inflasi di Indonesia.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

Agar pelaksanaan penelitian ini dapat berjalan dengan baik maka perlu dipahami hal-hal yang berkaitan dengan penelitian ini. Hal ini sangat penting untuk dibahas karena pengertian terhadap objek yang diteliti merupakan salah satu unsur dalam pemahaman, untuk itu peneliti akan memberikan penjelasan dari variabel yang terdapat dalam penelitian.

2.1.1 Inflasi

2.1.1.1 Pengertian Inflasi

Inflasi merupakan suatu fenomena ekonomi moneter dimana kestabilan perekonomian terganggu dengan adanya kecenderungan harga-harga umum secara terus menerus mengalami kenaikan. Bukan kenaikan harga satu atau dua macam barang saja melainkan kenaikan harga dari sebagian besar barang dan jasa, dan bukan pula hanya satu atau dua kali kenaikan harga, melainkan kenaikan harga secara terus menerus. Untuk mengukur tingkat inflasi tersebut digunakan indeks harga konsumen. Perubahan indeks harga konsumen dari waktu ke waktu menggambarkan tingkat kenaikan (inflasi) atau tingkat penurunan dari barang dan jasa.

Menurut Boediono (1993:97) inflasi adalah kecenderungan dari kenaikan harga secara umum dan terus menerus. Ada tiga komponen yang harus dipenuhi agar dapat dikatakan telah terjadi inflasi, antara lain:

1. Kenaikan harga

Harga suatu komoditas dikatakan naik jika menjadi lebih tinggi daripada harga periode sebelumnya

2. Bersifat Umum

Kenaikan harga suatu komoditas belum dapat dikatakan inflasi jika kenaikan tersebut tidak menyebabkan harga secara umum naik

3. Berlangsung terus menerus

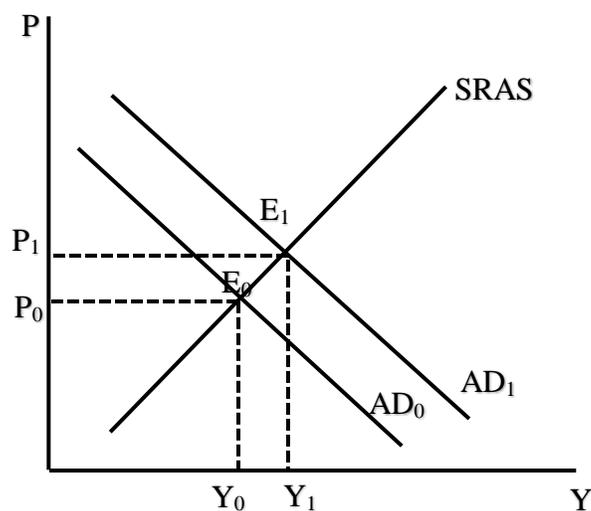
Kenaikan harga yang bersifat umum juga belum akan memunculkan inflasi, jika terjadi sesaat, karena itu perhitungan inflasi dilakukan dalam rentang waktu minimal bulanan

Menurut Sadono (2006:333) penggolongan inflasi berdasarkan penyebab awal terjadinya didasarkan atas tiga macam sebagai berikut:

1. Inflasi karena dorongan permintaan (*Demand Pull Inflation*)

Demand Pull Inflation adalah inflasi yang disebabkan adanya kenaikan permintaan agregat (AD) yang terlalu besar atau pesat dibandingkan dengan penawaran atau produksi agregat. Secara grafik, Demand Pull Inflation dapat dijelaskan dengan gambar 2.1. Dari gambar tersebut ditunjukkan bahwa perekonomian mula-mula berada pada titik

E_0 . Dengan kenaikan permintaan agregat (AD) dari AD_0 ke AD_1 , yang menyebabkan tingkat harga naik dari P_0 ke P_1 dan pada saat yang sama perekonomian akan bergerak sepanjang kurva penawaran agregat jangka pendek (SRAS) dari titik E_0 ke E_1 . Dalam jangka pendek output naik dari Y_0 ke Y_1 .

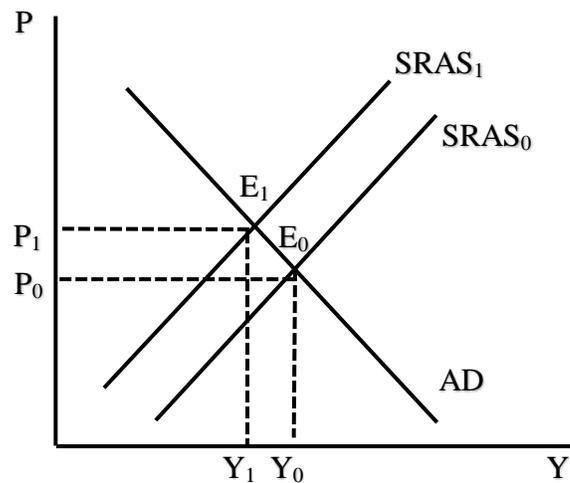


Gambar 2.1
Kurva Demand Pull Inflation

2. Inflasi karena biaya (*Cost Push Inflation*)

Cost Push Inflation adalah inflasi yang terjadi sebagai akibat dari adanya kenaikan biaya barang produksi yang pesat dibandingkan dengan produktivitas dan efisiensi, yang menyebabkan perusahaan mengurangi supply barang dan jasa mereka di pasar. Secara grafik *cost push inflation* dapat dijelaskan pada gambar 2.2. Pada gambar ditunjukkan bahwa kondisi perekonomian mula-mula berada di titik E_0 , kemudian dengan adanya kenaikan biaya produksi yang menyebabkan kurva penawaran agregat jangka pendek (SRAS) bergeser sepanjang kurva permintaan

agregat (AD), yaitu dari $SRAS_0$ ke $SRAS_1$ telah mendorong perekonomian bergerak dari titik E_0 ke E_1 . Akibatnya harga naik dari P_0 ke P_1 dan sebaliknya output turun dari Y_0 ke Y_1 .



Gambar 2.2

Kurva Cost Push Inflation

3. Inflasi Struktural (*Structural Inflation*)

Structural Inflation adalah inflasi yang terjadi sebagai akibat dari berbagai kendala atau kekuatan struktural yang menyebabkan penawaran di dalam perekonomian menjadi kurang atau tidak responsive terhadap permintaan yang meningkat.

2.1.1.2 Penanggulangan Inflasi

Untuk mengatasi masalah inflasi umumnya dituangkan dalam kebijakan. Pemerintah dapat menanggulangi inflasi dengan mengambil kebijakan moneter atau kebijakan fiskal.

Kebijakan moneter biasanya lebih efektif untuk mengatasi masalah inflasi daripada untuk mendorong ekspansi kegiatan ekonomi pada jangka pendek. Instrumen yang biasa digunakan dalam kebijakan moneter melalui Bank Sentral untuk menanggulangi inflasi sebagai berikut:

1. Operasi Pasar Terbuka (*Open Market Operation*)

Operasi pasar terbuka adalah usaha atau tindakan-tindakan untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk membeli atau menjual surat-surat berharga milik Negara. Kegiatan penjualan surat berharga ini akan mengurangi cadangan wajib bank umum. Dengan demikian jumlah uang beredar di masyarakat akan berkurang dan kenaikan harga-harga pun dapat ditekan.

2. Kebijakan Tingkat Suku Bunga Diskonto (*Discount Rate Policy*)

Kebijakan tingkat suku bunga diskonto adalah tindakan Bank Sentral dengan mengubah tingkat suku bunga diskonto yang harus dibayar oleh bank umum atas dana pinjaman dari Bank Sentral. Kenaikan suku bunga diskonto akan menyebabkan naik suku bunga kredit kepada masyarakat. Sehingga kredit investasi yang diberikan

akan turun. Turunnya kredit investasi berakibat pula pada menurunnya pendapatan nasional, dan berpengaruh terhadap turunnya permintaan agregat yang pada akhirnya harga-harga barang pun akan turun.

3. Kebijakan Cadangan Wajib (*Reserve Requirement Policy*)

Kebijakan cadangan wajib berkaitan dengan tindakan Bank Sentral dalam menetapkan cadangan wajib bagi bank umum di Bank Sentral. Jika cadangan wajib yang dikenakan oleh Bank Sentral tinggi, jumlah pasokan uang akan turun, selanjutnya jumlah uang beredar di masyarakat menjadi lebih sedikit sehingga harga-harga pun berkurang.

4. Kebijakan Kredit Selektif

Kebijakan kredit selektif berkaitan dengan kebijakan bank umum dalam menyalurkan kredit kepada nasabah dengan memperhatikan unsur character, collateral, capital, capacity, dan condition of economy.

Berdasarkan kebijakan fiskal, kebijakan ini menyangkut pengaturan pengeluaran pemerintah dan perpajakan yang secara langsung mempengaruhi harga. Inflasi dapat dicegah melalui penurunan permintaan total. Kebijakan fiskal melalui tiga cara sebagai berikut:

1. Meningkatkan penerimaan pajak, dengan memberlakukan tingkat pajak yang tinggi bagi unit usaha yang tidak memproduksi kebutuhan pokok masyarakat.
2. Mengurangi pengeluaran pemerintah dengan menunda atau menghapuskan pengeluaran yang bukan prioritas.
3. Mengadakan pinjam pemerintah yaitu mengurangi pembayaran yang dilakukan pada masyarakat dan mengembalikannya di kemudian hari, misal dalam bentuk pensiun.

2.1.1.3 Teori Inflasi

2.1.1.3.1 Teori Keynes

Menurut teori ini, bahwa terjadinya inflasi disebabkan oleh masyarakat yang ingin hidup melebihi batas kemampuan ekonominya. Sehingga proses inflasi merupakan proses Tarik menarik antar golongan masyarakat untuk memperoleh bagian dan masyarakat yang lebih besar daripada yang mampu disediakan oleh masyarakat itu sendiri. Jika hal ini terus terjadi maka akan timbul kesenjangan inflasi/*inflationary gap*. Tekanan dari golongan ini akan mengakibatkan kenaikan biaya. *Inflationary gap* ini dapat ditimbulkan oleh pemerintah yang menjalankan defisit anggaran belanjanya yang dibiayai dengan mencetak uang baru. Selain itu dapat ditimbulkan oleh pengusaha swasta yang ingin melakukan investasi

baru dan memperoleh pembiayaan dari kredit bank dan serikat buruh yang berusaha untuk memperoleh kenaikan gaji.

Teori klasik maupun Keynes menyetujui bahwa inflasi ada kaitannya dengan jumlah uang beredar, tetapi juga dengan jumlah barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian. Oleh karena itu untuk menanggulangi inflasi yang utama ialah bagaimana menekan laju pertumbuhan jumlah uang beredar atau dapat pula mengurangi jumlah uang beredar. Cara ini dapat ditempuh secara bertahap (*gradual approach*), tetapi dapat juga dengan cara yang drastis (*cold turkey approach*).

Dengan pendekatan gradual kebijakan yang ditempuh ialah dengan sedikit pengurangan laju pertumbuhan jumlah uang yang beredar. Tindakan ini akan mengurangi laju peningkatan harga, tetapi juga akan menambah tingkat pengangguran. Namun pengambil kebijakan tidak akan membiarkan perekonomian mengalami tingkat pengangguran yang semakin tinggi, sehingga suatu penyesuaian akan terjadi yaitu karena tingkat inflasi yang diharapkan semakin berkurang dan adanya tingkat pengangguran, maka kurva Phillips akan bergeser ke kiri. Sebagai hasil dari proses penyesuaian yang berjalan terus itu, maka perekonomian akan mengalami tingkat inflasi yang rendah dan berada dalam kesempatan kerja penuh.

Dengan pendekatan yang lain yaitu pendekatan yang menghendaki pengurangan jumlah uang beredar secara drastis (*cold turkey approach*),

pengambil kebijakan berusaha menghilangkan inflasi secara cepat. Strategi ini dimulai dengan pengurangan pertumbuhan jumlah uang yang beredar secara tajam sehingga dapat menciptakan suatu resesi yang hebat dan inflasi hanya akan menurun sedikit saja. Hal ini dapat terjaid karena penurunan kesempatan kerja yang drastis yang membarengi turunnya laju inflasi, justru akan menyebabkan tingkat upah meningkat. Dengan bertambahnya tingkat pengangguran, maka upah untuk golongan pekerja yang memiliki keahlian khusus dan di atas cukup kualitasnya akan semakin tinggi harganya. Pendekatan ini akan mendorong turunnya tingkat inflasi sehingga jumlah produksi nasional dan tingkat kesempatan kerja menjadi pulih pada tingkat kesempatan kerja penuh.

Dari kedua macam pendekatan tersebut sebenarnya dapat dilakukan pilihan alternatif mana yang diinginkan. Dengan pendekatan gradual, inflasi akan terobati secara perlahan-lahan, dan perekonomian akan tidak terlalu menjauhi posisi kesempatan kerja penuh atau paling tidak disertai dengan tingkat pengangguran alamiah tertentu. Sedangkan dengan pendekatan spontan (cold turkey), maka perekonomian dapat cepat mengalami penurunan tingkat inflasi tetapi disertai dengan peningkatan jumlah pengangguran yang lebih besar daripada dalam pendekatan gradual. Memang ada kelebihan dari pendekatan spontan ini yaitu adanya kemantapan kebijakan yang jelas ditujukan untuk menanggulangi inflasi,

sedangkan pendekatan gradual di samping membutuhkan waktu lama untuk pelaksanaannya, inflasi akan dapat dihindarkan apabila ternyata menciptakan tingkat pengangguran yang tinggi melebihi apa yang diharapkan semula.

2.1.1.3.2 Teori Strukturalis

Teori ini merupakan teori mengenai Inflasi yang didasarkan atas pengalaman di negara Amerika Latin. Dasar pemikiran dari teori strukturalis adalah inflasi terjadi akibat adanya kendala struktural dalam perekonomian. Kaum strukturalis berpendapat bahwa penyebab inflasi di negara-negara berkembang adalah peningkatan harga komoditi pangan dan inflasi dari luar negeri. Inflasi di negara berkembang umumnya ditimbulkan oleh tekanan-tekanan sebagai akibat dari pertumbuhan ekonomi terhadap struktur sosial dan ekonomi yang masih terbelakang. Pada sektor pertanian dikemukakan bahwa terlambatnya pertumbuhan produktifitas atau faktor iklim menyebabkan penurunan produksi atau faktor iklim menyebabkan penurunan produksi dan peningkatan harga pangan. Di sektor perdagangan luar negeri penurunan nilai mata uang menyebabkan harga barang-barang impor menjadi semakin tinggi.

2.1.2 Jumlah Uang Beredar

2.1.2.1 Pengertian Jumlah Uang Beredar

Terdapat dalam perekonomian sangat penting untuk membedakan diantara mata uang dalam peredaran dan uang beredar. Mata uang dalam peredaran adalah seluruh jumlah uang yang telah dikeluarkan dan diedarkan oleh Bank Sentral. Mata uang tersebut terdiri dari dua jenis yaitu uang logam dan uang kertas. Dengan demikian mata uang dalam peredaran sama dengan uang kartal. Sedangkan Uang Beredar adalah seluruh uang kartal dan uang giral yang tersedia untuk digunakan oleh masyarakat. Definisi paling sempit dari jumlah uang beredar adalah uang kertas dan uang logam yang ada ditangan masyarakat. Dornbusch (1987) memberi definisi tentang jumlah uang beredar sebagai berikut:

$$M1 = C + DD + TD$$

$$M2 = M1 + TD + SD$$

Dimana C adalah uang kartal (*currency*), DD adalah uang giral (*demand deposit*), TD adalah deposito berjangka (*time deposit*), dan SD adalah saldo tabungan (*saving deposit*).

2.1.2.1.1 Uang Beredar Dalam Arti Sempit (M1)

Uang beredar dalam arti sempit (M1) didefinisikan sebagai uang kartal ditambah dengan uang giral (*Currency plus demand deposito*).

$$M1 = C + DD$$

Dimana:

M1 = Jumlah uang beredar dalam arti sempit

C = Currency (uang kartal)

DD = Demand Deposito (uang giral)

Uang giral (DD) di sini hanya mencakup saldo rekening Koran atau giro milik masyarakat umum yang disimpan di bank. Sedangkan saldo rekening Koran milik bank pada bank lain atau bank sentral (Bank Indonesia) ataupun saldo rekening Koran milik pemerintah pada bank atau bank sentral tidak dimasukkan dalam definisi DD. Satu hal lagi yang penting untuk dicatat mengenai DD ini adalah bahwa yang dimaksud disini adalah saldo atau uang milik masyarakat yang masih ada di bank dan belum digunakan pemiliknya untuk membayar atau berbelanja.

Pengertian jumlah uang beredar dalam arti sempit (M1) bahwa uang beredar adalah daya beli yang langsung bisa digunakan untuk

pembayaran, bisa diperluas dan mencakup alat-alat pembayaran yang mendekati uang, misalnya deposito berjangka (*time deposits*) dan simpanan tabungan (*saving deposits*) pada bank-bank. Uang yang disimpan dalam bentuk deposito berjangka dan tabungan ini sebenarnya adalah juga daya beli potensial bagi pemiliknya, meskipun tidak semudah uang tunai atau cek untuk menggunakannya (Boediono, 1994:3-5).

2.1.2.1.2 Uang Beredar Dalam Arti Luas (M2)

Berdasarkan system moneter Indonesiaa, uang beredar M2 sering disebut juga dengan likuiditas perekonomian. M2 diartikan sebagai M1 *plus* deposito berjangka dan saldo tabungan milik masyarakat pada bank-bank, karena perkembangan M2 ini juga bisa mempengaruhi perkembangan harga, produksi dan keadaan ekonomi pada umumnya.

$$M2 = M1 + TD + SD$$

Dimana :

TD = *time deposits* (deposito berjangka)

SD = *savings deposits* (saldo tabungan)

Definisi M2 yang berlaku umum untuk semua Negara tidak ada, karena hal-hal khas masing-masing Negara perlu dipertimbangkan. Di Indonesia, M2 besarnya mencakup semua deposito berjangka dan saldo tabungan dalam rupiah pada bank-bank dengan tidak tergantung besar kecilnya simpanan tetapi tidak mencakup deposito berjangka dan saldo tabungan dalam mata uang asing (Boediono, 1994:5-6).

2.1.2.1.3 Uang Beredar Dalam Arti Lebih Luas (M3)

Definisi uang beredar dalam arti lebih luas adalah M3, yang mencakup semua deposito berjangka (TD) dan saldo tabungan (SD), besar kecil, rupiah atau mata uang asing milik penduduk pada bank oleh lembaga keuangan non bank. Seluruh TD dan SD ini disebut uang kuasi atau *quasi money*.

$$M3 = M2 + QM$$

Dimana :

$M2 = \textit{Broad Money}$

$QM = \textit{quasi money}$

Di Negara yang menganut system devisa bebas (artinya setiap orang boleh memiliki dan memperjualbelikan devisa secara bebas), seperti Indonesia, memang sedikit sekali perbedaan antara TD dan SD

dalam rupiah dan TD dan SD dalam dollar. Setiap kali membutuhkan rupiah dollar bisa langsung menjualnya ke bank, atau sebaliknya. Dalam hal ini perbedaan antara M2 dan M3 menjadi tidak jelas. TD dan SD dollar milik *bukan penduduk* tidak termasuk dalam definisi uang kuasi (Boediono, 1994:6).

2.1.2.2 Teori Uang Beredar

2.1.2.2.1 Irving Fisher

Ekonomi selalu berada dalam keadaan *full employment* (tenaga kerja penuh). Secara sederhana, Irving Fisher merumuskan teorinya dengan persamaan sebagai berikut:

$$M.V = P.T$$

Dimana:

M : Jumlah uang kertas, logam dan uang giral yang beredar dalam perekonomian.

V : Perputaran uang dalam suatu periode.

P : Harga barang

T : Volume barang yang diperdagangkan.

Persamaan diatas menunjukkan bahwa nilai barang yang diperdagangkan sama dengan jumlah uang beredar dikalikan

kecepatan perputarannya. Meskipun demikian persamaan diatas dapat diubah menjadi permintaan uang

1. Dengan mengganti volume barang yang diperdagangkan atau jumlah unit transaksi (T) dengan output riil (Q), sehingga formulasi teori kuantitas menjadi:

Dimana:

$$M.V = P.Q$$

$$Y = P.Q = \text{GNP nominal}$$

V = Tingkat perputaran pendapatan (*income velocity of money*)

Pada suatu periode tertentu, kuantitas barang yang diperdagangkan (Q) jumlahnya tertentu. Dalam keseimbangan (*full employment*) nilai Q juga tetap. Nilai (V) relative karena mencerminkan tata cara masyarakat mempergunakan uang. Dengan sendirinya (V) hanya berubah kalau terjadi perubahan kelembagaan, misalnya kebiasaan melakukan pembayaran serta perubahan teknologi komunikasi. Konsekuensi dari kedua anggapan ini < maka M hanyalah mempengaruhi P.

2. Dikemukakan oleh A.Marshall dari Cambridge University, Marshall memandang persamaan Irving Fisher dengan sedikit berbeda. Tidak menekankan pada perputaran uang (*velocity*) dalam suatu periode, melainkan pada bagian pendapatan (GNP) yang

diwujudkan dalam bentuk uang kas. Secara matematika sederhana, teori Marshall dituliskan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} M &= k.P.Q \\ &= k.Y \end{aligned}$$

Dimana k adalah proporsi atau bagian dari GNP yang diwujudkan dalam bentuk uang kas, jadi besarnya sama dengan I/V . Marshall tidak menggunakan volume transaksi (T) sebagai alat pengukur, jumlah output, tetapi diganti dengan Y . Jadi T pada umumnya lebih besar dari pada Y , sebab dalam pengertian T termasuk juga total transaksi barang akhir atau setengah jadi.

Menurut teori kuantitas uang, perubahan jumlah uang yang beredar akan mengakibatkan perubahan pendapatan, harga secara proporsional. Artinya kalau jumlah uang naik dua kali, maka harga akan naik dua kali juga. Tetapi kelemahan dari teori ini adalah mengabaikan pengaruh tingkat bunga terhadap permintaan uang (Prathama Rahardja, 1999:20).

2.1.2.2.2 Teori Cambridge (Marshall-Pigou)

Teori Cambridge, berpokok pada fungsi uang sebagai alat tukar umum (*mean of exchange*). Karena itu, teori-teori klasik melihat kebutuhan uang (permintaan akan uang) dari masyarakat sebagai kebutuhan akan alat likuid untuk tujuan transaksi.

Teori Cambridge mengatakan bahwa kegunaan dari pemegang kekayaan dalam bentuk uang adalah karena uang (berbeda dengan bentuk kekayaan lain) mempunyai sifat likuid sehingga dengan mudah bisa ditukarkan dengan barang lain. Uang dipegang atau diminta oleh seseorang karena sangat mempermudah transaksi atau kegiatan-kegiatan ekonomi lain dari orang tersebut (sering disebut sebagai faktor “*convenience*”).

Teori Cambridge lebih menekankan faktor-faktor perilaku (pertimbangan untung rugi) yang menghubungkan antara permintaan akan uang seseorang dengan volume transaksi yang direncanakannya. Teoritisi Cambridge mengatakan bahwa permintaan selain dipengaruhi oleh volume transaksi dan faktor-faktor kelembagaan, juga dipengaruhi oleh tingkat bunga, besar kekayaan warga masyarakat, dan ramalan atau harapan (*expectation*) dari pada warga masyarakat mengenai masa mendatang. Faktor-faktor lain ini mempengaruhi permintaan akan uang seseorang, dan demikian juga mempengaruhi permintaan akan uang dari masyarakat secara keseluruhan (Boediono, 1994:23-25).

2.1.2.2.3 Teori Keynes

Teori uang Keynes adalah teori yang bersumber pada teori Cambridge, tetapi Keynes memang mengemukakan sesuatu yang benar-benar berbeda dengan teori moneter tradisi Klasik. Pada hakekatnya

perbedaan ini terletak pada penekanan oleh Keynes pada fungsi uang yang lain, yaitu sebagai *store of value* dan bukan hanya sebagai *means of exchange*. Teori ini kemudian terkenal dengan nama teori *Liquidity Preference* (Boediono, 1994:27).

Menurut Keynes, ada tiga tujuan masyarakat memegang uang, yaitu :

1. Tujuan Transaksi

Keynes tetap menerima pendapat golongan Cambridge, bahwa orang memegang uang guna memenuhi dan melancarkan transaksi-transaksi yang dilakukan, dan permintaan akan uang dari masyarakat untuk tujuan ini dipengaruhi oleh tingkat pendapatan nasional dan tingkat bunga. Semakin besar tingkat pendapatan nasional semakin besar volume transaksi dan semakin besar pula kebutuhan uang untuk memenuhi tujuan transaksi. Demikian pula Keynes berpendapat bahwa permintaan akan uang untuk tujuan transaksi inipun tidak merupakan suatu proporsi yang konstan, tetapi dipengaruhi pula oleh tinggi rendahnya tingkat bunga.

2. Tujuan Berjaga-Jaga

Keynes juga membedakan permintaan akan uang untuk tujuan melakukan pembayaran-pembayaran yang tidak regular atau yang diluar rencana transaksi normal, misalnya untuk pembayaran

keadaan-keadaan darurat seperti kecelakaan, sakit, dan pembayaran yang tak terduga lain. Permintaan uang seperti ini disebut dengan permintaan uang untuk tujuan berjaga-jaga (*precautionary motive*). Menurut Keynes permintaan akan uang untuk tujuan berjaga-jaga ini dipengaruhi oleh faktor-faktor yang sama dengan faktor yang mempengaruhi permintaan akan uang untuk transaksi, yaitu terutama dipengaruhi oleh tingkat penghasilan dan tingkat bunga.

3. Tujuan Spekulasi

Motif dari pemegangan uang untuk tujuan spekulasi adalah terutama bertujuan untuk memperoleh “keuntungan” yang bisa diperoleh dari seandainya si pemegang uang tersebut meramal apa yang akan terjadi dengan benar.

2.1.3 Nilai Tukar

2.1.3.1 Pengertian Nilai Tukar

Perdagangan yang dilakukan antara dua negara tidaklah semudah yang dilakukan dalam satu Negara. Karena harus memakai dua mata uang yang berbeda misalnya antara Negara Indonesia dan Amerika Serikat. Pengimpor Amerika harus membeli rupiah untuk membeli barang-barang dari Indonesia. Sebaliknya pengimpor Indonesia harus membeli Dollar Amerika untuk menyelesaikan pembayaran terhadap barang yang dibelinya di Amerika.

Menurut Sadono Sukirno (1976:292) besarnya jumlah mata uang tertentu yang diperlukan untuk memperoleh satu unit valuta asing disebut dengan *kurs mata uang asing*.

Beberapa faktor penting yang mempunyai pengaruh atas perubahan kurs pertukaran menurut Sadono Sukirno (1976:296) adalah:

1. Perubahan dalam cita rasa masyarakat

Bila penduduk suatu Negara lebih menyukai barang-barang dari Negara lain maka nilai mata uang asing tersebut akan semakin naik.

2. Perubahan harga dari barang-barang ekspor

Semakin tinggi harga barang yang akan diekspor, semakin turun nilai mata uang pengekspor tersebut.

3. Kenaikan harga-harga umum (inflasi)

Semakin tinggi tingkat inflasi Negara pengekspor semakin turun nilai mata uang Negara tersebut.

4. Perubahan dalam tingkat bunga dan tingkat pengembalian investasi

Semakin tinggi tingkat bunga investasi di Negara tersebut semakin tinggi nilai mata uang Negara tersebut.

5. Perkembangan ekonomi

6. Semakin banyak nilai ekspor suatu Negara semakin kuat nilai mata uang Negara tersebut.

Sementara itu, penawaran valuta asing dipengaruhi oleh dua faktor utama yaitu :

1. Faktor penerimaan hasil ekspor, semakin besar volume penerimaan ekspor barang dan jasa, maka semakin besaar jumlah valuta asing yang dimiliki oleh suatu Negara dan pada lanjutannya nilai tukar terhadap mata uang asing cenderung menguat atau apresiasi. Sebaliknya, jika ekspor menurun maka jumlah valuta asing yang di miliki semakin menurun sehingga nilai tukar juga cenderung mengalami depresiasi.
2. Faktor aliran modal masuk (*capital inflow*). Semakin besar aliran modal masuk, maka nilai tukar akan cenderung semakin menguat. Aliran modal masuk tersebut dapat berupa penerimaan hutang luar negeri, penempatan dana jangka pendek oleh pihak asing (*portfolio investment*) dan investasi langsung pihak asing (*foreign direct investment*).

Ada dua jenis nilai tukar, yaitu nilai tukar nominal (*nominal exchange rate*) dan nilai tukar riil (*real exchange rate*). Nilai tukar nominal adalah suatu nilai di mana seseorang dapat memperdagangkan mata uang dari suatu Negara dengan mata uang Negara lain. Jika suatu mata uang mengalami apresiasi, dikatakan bahwa mata uang itu menguat, karena dapat membeli lebih banyak amat uang asing. Demikian pula ketika suatu mata uang mengalami depresiasi, dikatakan bahwa mata uang tersebut melemah. Sedangkan nilai tukar riil adalah suatu nilai di mana seseorang dapat memperdagangkan

barang dan jasa dari suatu negara dengan barang dan jasa dari negara lain (Mankiw Gregory, 2000:221-222).

Di Indonesia ada tiga sistem yang digunakan dalam kebijakan nilai tukar rupiah sejak tahun 1971 hingga sekarang. Antara tahun 1971 hingga 1978 dianut system nilai tukar tetap (*fixed exchange rate*) dimana nilai rupiah secara langsung dikaitkan dengan dollar Amerika Serikat (USD). Sejak 15 November 1978 sistem nilai tukar diubah menjadi mengambang terkendali (*managed floating exchange rate*) dimana nilai rupiah tidak lagi semata-mata diaitkan dengan USD, namun terhadap sekeranjang valuta partner dagang utama. Maksud dari sistem nilai tukar tersebut adalah bahwa meskipun diarahkan ke system nilai tukar mengambang namun tetap menitikberatkan unsur pengendalian. Kemudian terjadi perubahan mendasar dalam kebijakan mengambang terkendali terjadi pada tanggal 14 Agustus 1997, dimana jika sebelumnya Bank Indonesia menggunakan *band* sebagai *guidance* atas pergerakan nilai tukar, maka sejak saat itu tidak ada lagi *band* sebagai acuan nilai tukar. Namun demikian cukup sulit menjawab apakah nilai tukar rupiah sepenuhnya dilepas ke pasar (*free floating*) atau masih akan dilakukan intervensi oleh Bank Indonesia. Dengan mengamati segala dampak dari sistem *free floating* serta dikaitkan dengan kondisi atau struktur perekonomian Indonesia selama ini nampaknya *purely free floating* sulit untuk dilakukan. Kemungkinannya adalah Bank Indonesia akan tetap mempertahankan

managed floating dengan melakukan intervensi secara berkala, selektif dan pada *timing* yang tepat (Isnowati Sri, 2002).

2.1.3.2 Teori Nilai Tukar

Untuk menjelaskan fluktuasi nilai kurs dalam jangka panjang dapat dijelaskan dengan kerangka teori paritas daya beli. Teori paritas daya beli pertama kali dikemukakan oleh *Gustav cassell* (1992). Teori paritas daya beli didasarkan pada prinsip yang disebut hukum satu harga (*the law of one price*). Teori ini menyatakan bahwa satu unit dari setiap mata uang seharusnya mampu membeli barang-barang di semua negara dalam jumlah yang sama.

Teori paritas daya beli mengandung dua pengertian, yaitu pengertian absolut dan pengertian relative. Secara absolut teori paritas daya beli merumuskan bahwa kurs antara dua mata uang merupakan rasio dari tingkat harga umum dari dua negara yang bersangkutan. Sedangkan menurut teori paritas daya beli versi relative menyatakan bahwa fluktuasi kurs dalam jangka waktu tertentu akan bersifat proporsional atau sebanding besarnya terhadap perubahann tingkat harga yang berlaku di kedua Negara selama periode yang sama (Yuliadi, 2004;64).

Beberapa hal yang perlu ditekankan dari teori paritas daya beli adalah pertama masalah dasar dari paritas daya beli, yakni proporsionalitas tingkat harga dan nilai tukar hanya terjadi jika penyebab guncangan yang mengubah tingkat harga dari nilai tukar merupakan suatu guncangan moneter. Kedua, teori

paritas daya beli tersebut tidak bekerja seketika, tetapi memerlukan waktu yang cukup lama, sehingga dapat dikatakan bahwa teori tersebut menunjukkan hubungan keseimbangan jangka panjang antara nilai tukar dengan tingkat harga.

2.1.4 Pengeluaran Pemerintah

2.1.4.1 Pengertian Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah merupakan salah satu komponen kebijakan fiskal yang bertujuan untuk laju inflasi, meningkatkan kesempatan kerja, memelihara kestabilan ekonomi dan menciptakan distribusi pendapatan yang merata melalui belanja Negara baik itu belanja rutin maupun belanja pembangunan.

Menurut Basri dan Subri (2003), Pengeluaran pemerintah itu sangat bervariasi, namun secara garis besarnya dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Pengeluaran yang merupakan investasi yang menambah kekuatan dan ketahanan ekonomi dimasa yang akan datang.
2. Pengeluaran yang langsung memberikan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.
3. Pengeluaran yang merupakan penghematan terhadap masa yang akan datang. Pengeluaran untuk menyediakan kesempatan kerja yang lebih luas dan menyebarkan daya beli yang luas.

Pengeluaran pemerintah berperan dalam untuk mempertemukan antara permintaan masyarakat dengan penyediaan sarana dan prasarana yang tidak dapat di penuhi oleh swasta. Pengeluaran pemerintah yang terus berkembang mengakibatkan penerimaan negara harus ditingkatkan. Hal ini berarti bahwa pemerintah harus dapat menggali sumber-sumber penerimaan yang sebagian besar berasal dari pajak.

Walaupun secara keseluruhan pengeluaran pemerintah sangat penting dalam sumbangannya terhadap pendapatan nasional, tetapi yang lebih penting lagi adalah penentuan komposisi dari pengeluaran pemerintah tersebut. Komposisi dari pengeluaran pemerintah merupakan strategi untuk mencapai sasaran dari pembangunan nasional.

2.1.4.2 Teori Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah. Apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Teori mengenai pengeluaran pemerintah juga dapat dikelompokan menjadi 2 bagian yaitu teori makro dan teori mikro.

2.1.4.2.1 Teori Makro

Pengeluaran pemerintah dalam arti riil dapat dipakai sebagai indikator besarnya kegiatan pemerintah yang dibiayai oleh

pengeluaran pemerintah. Semakin besar dan banyak kegiatan pemerintah semakin besar pula pengeluaran pemerintah yang bersangkutan. Dalam teori ekonomi makro, pengeluaran pemerintah terdiri dari tiga pos utama yang dapat digolongkan sebagai berikut :

(Boediono,1999)

1. Pengeluaran pemerintah untuk pembelian barang dan jasa.
2. Pengeluaran pemerintah untuk gaji pegawai.

Perubahan gaji pegawai mempunyai pengaruh terhadap proses makro ekonomi, di mana perubahan gaji pegawai akan mempengaruhi tingkat permintaan secara tidak langsung.

3. Pengeluaran pemerintah untuk transfer payment.

Transfer payment bukan pembelian barang atau jasa oleh pemerintah dipasar barang melainkan mencatat pembayaran atau pemberian langsung kepada warganya yang meliputi misalnya pembayaran subsidi atau bantuan langsung kepada berbagai golongan masyarakat, pembayaran pensiun, pembayaran bunga untuk pinjaman pemerintah kepada masyarakat. Secara ekonomis transfer payment mempunyai status dan pengaruh yang sama dengan pos gaji pegawai meskipun secara administrasi keduanya berbeda.

2.1.4.2.1.1 Model Pembangunan Tentang Perkembangan Pengeluaran Pemerintah

Model ini diperkenalkan dan dikembangkan oleh Rostow dan Musgrave yang menghubungkan perkembangan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi yang dibedakan antara tahap awal, tahap menengah, dan tahap lanjut. Pada tahap awal terjadinya perkembangan ekonomi, presentase investasi pemerintah terhadap total investasi besar karena pemerintah harus menyediakan fasilitas dan pelayanan seperti pendidikan, kesehatan, transportasi. Kemudian pada tahap menengah terjadinya pembangunan ekonomi, investasi pemerintah masih diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar dapat semakin meningkat, tetapi pada tahap ini peranan investasi swasta juga semakin besar. Sebenarnya peranan pemerintah juga tidak kalah besar dengan peranan swasta. Semakin besarnya peranan swasta juga banyak menimbulkan kegagalan pasar yang terjadi.

Musgrave memiliki pendapat bahwa investasi swasta dalam presentase terhadap GNP semakin besar dan presentase investasi pemerintah dalam presentase terhadap GNP akan semakin kecil. Pada tingkat ekonomi selanjutnya, Rostow

mengatakan bahwa aktivitas pemerintah beralih dari penyediaan prasarana ke pengeluaran-pengeluaran untuk aktivitas sosial seperti kesejahteraan hari tua, program pelayanan kesehatan masyarakat.

2.1.4.2.1.2 Teori Adolf Wagner

Adolf Wagner menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah dan kegiatan pemerintah semakin lama semakin meningkat. Tendensi ini oleh Wagner disebut dengan hukum selalu meningkatnya peranan pemerintah. Inti teorinya yaitu makin meningkatnya peran pemerintah dalam kegiatan dan kehidupan ekonomi masyarakat sebagai suatu keseluruhan. Wagner menyatakan bahwa dalam suatu perekonomian apabila pendapatan per kapita meningkat maka secara relatif pengeluaran pemerintah pun akan meningkat terutama disebabkan karena pemerintah harus mengatur hubungan yang timbul dalam masyarakat, hukum, pendidikan, rekreasi, kebudayaan dan sebagainya.

Berkaitan dengan hukum Wagner, dapat dilihat beberapa penyebab semakin meningkatnya pengeluaran pemerintah, yakni meningkatnya fungsi pertahanan keamanan dan ketertiban, meningkatnya fungsi kesejahteraan, meningkatnya fungsi

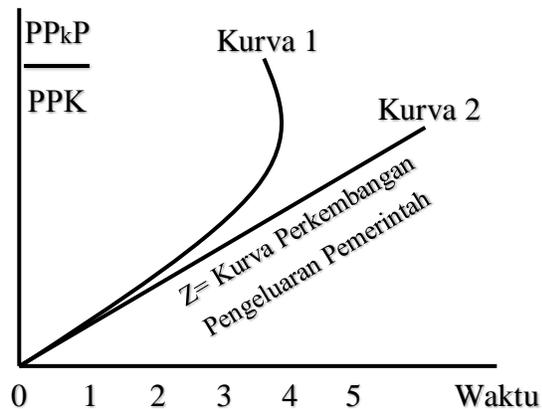
perbankan dan meningkatnya fungsi pembangunan. Hukum Wagner dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$\frac{PP_kP}{PPK_1} < \frac{P_kPP_n}{PPK_2} < \dots < \frac{P_kPP_n}{PPK_n}$$

PPkP : Pengeluaran pemerintah per kapita

PPK : Pendapatan per kapita, yaitu GDP/jumlah penduduk

1, 2, ... n: jangka waktu (tahun)



Gambar 2.3
Perkembangan Pengeluaran Pemerintah Menurut Wagner

Teori Wagner mendasarkan pandangannya pada suatu teori yang disebut *organic theory of state* yaitu teori organis yang menganggap pemerintah sebagai individu yang bebas bertindak terlepas dengan masyarakat lain. Kurva diatas menunjukkan secara relatif peranan pemerintah semakin meningkat.

2.1.4.2.1.3 Teori Peacock dan Wiseman

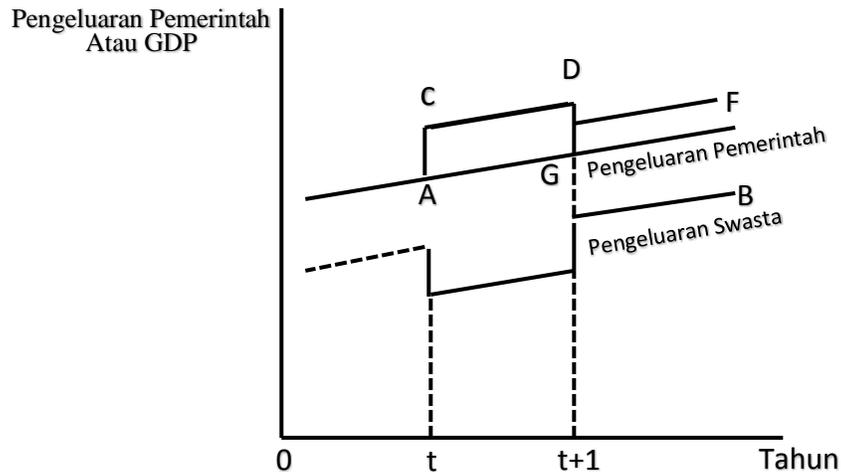
Teori mereka didasarkan pada suatu analisis penerimaan pengeluaran pemerintah. Pemerintah selalu berusaha memperbesar pengeluarannya dengan mengandalkan memperbesar penerimaan dari pajak, padahal masyarakat tidak menyukai pembayaran pajak yang besar untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang semakin besar tersebut. Meningkatnya penerimaan pajak menyebabkan pengeluaran pemerintah juga semakin meningkat. Dalam keadaan normal meningkatnya GNP menyebabkan penerimaan pemerintah yang semakin besar, begitu juga dengan pengeluaran pemerintah menjadi semakin besar.

Peacock dan Wiseman mendasarkan teori mereka pada suatu teori bahwa masyarakat mempunyai suatu tingkat toleransi pajak, yaitu suatu tingkat dimana masyarakat dapat memahami besarnya pungutan pajak yang dibutuhkan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Jadi masyarakat menyadari bahwa pemerintah membutuhkan dana untuk membiayai aktivitas pemerintah sehingga mereka mempunyai tingkat kesediaan masyarakat untuk membayar pajak. Tingkat toleransi ini merupakan kendala bagi pemerintah untuk menaikkan pemungutan pajak secara semena-mena.

Dalam teori Peacock dan Wiseman terdapat efek penggantian (displacement effect) yaitu adanya gangguan sosial yang menyebabkan aktivitas swasta dialihkan pada aktivitas pemerintah. Pengentasan gangguan tidak hanya cukup dibiayai semata-mata dengan pajak sehingga pemerintah harus meminjam dana dari luar negeri. Setelah gangguan teratasi muncul kewajiban melunasi utang dan membayar bunga. Pengeluaran pemerintah yang semakin bertambah bukan hanya karena GNP bertambah tetapi karena adanya kewajiban baru tersebut. Akibat lebih lanjut adalah pajak tidak menurun kembali ke tingkat semula meskipun gangguan telah berakhir.

Selain itu, masih banyak aktivitas pemerintah yang baru kelihatan setelah terjadinya perang dan ini disebut efek inspeksi (inspection effect). Adanya gangguan sosial juga akan menyebabkan terjadinya konsentrasi kegiatan ke tangan pemerintah yang sebelumnya dilaksanakan oleh swasta. Efek inilah disebut sebagai efek konsentrasi (concentration effect). Dengan adanya ketiga efek tersebut menyebabkan bertambahnya aktivitas pemerintah sehingga setelah perang selesai tingkat pajak tidak menurun kembali pada tingkat sebelum terjadi perang.

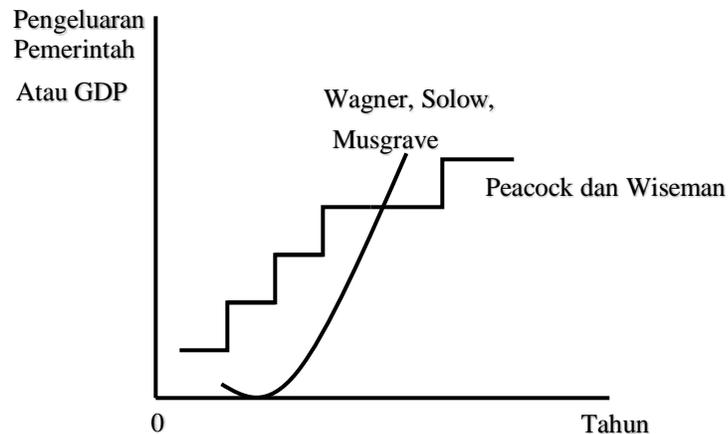
Adanya dampak eksternal tadi digambarkan dalam bentuk kurva dibawah ini :



Gambar 2.4
Kurva Teori Peacock dan Wiseman

Dalam keadaan normal, t ke $t+1$, pengeluaran pemerintah dalam persentase terhadap GNP meningkat sebagaimana yang ditunjukkan garis AG. Apabila pada tahun t terjadi perang maka pengeluaran pemerintah meningkat sebesar AC dan kemudian meningkat seperti yang ditunjukkan pada segmen CD. Setelah perang selesai pada tahun $t+1$, pengeluaran pemerintah tidak menurun ke G. Hal ini disebabkan setelah perang, pemerintah membutuhkan tambahan dana untuk mengembalikan pinjaman pemerintah yang digunakan dalam pembiayaan pembangunan.

Berbeda dengan pandangan Wagner, perkembangan pengeluaran pemerintah versi Peacock dan Wiseman tidaklah berbentuk suatu garis, seperti kurva di bawah, tetapi berbentuk seperti tangga.



Gambar 2.5
Perkembangan Pengeluaran Pemerintah
Menurut Rostow Musgrave dan Wiseman

Pengeluaran pemerintah menurut teori Wagner, Sollow, dan Musgrave digambarkan dalam bentuk kurva yang eksponensial, sedangkan teori Peacock dan Wiseman mengatakan bahwa pengeluaran pemerintah jika digambarkan dalam kurva seperti bentuk tangga. Hal ini dikarenakan adanya kendala toleransi pajak. Ketika masyarakat tidak ingin membayar pajak yang tinggi yang ditetapkan pemerintah, maka pemerintah tidak bisa meningkatkan pengeluarannya, walaupun pemerintah ingin senantiasa menaikkan pengeluarannya.

2.1.4.2.1.4 Teori batas kritis Colin Clark

Dalam teorinya, Collin Clark mengemukakan hipotesis tentang batas kritis perpajakan. Toleransi tingkat pajak dan pengeluaran pemerintah diperkirakan kurang dari 25 persen dari GNP, meskipun anggaran belanja pemerintah tetap seimbang.

Dikatakan bahwa jika kegiatan sektor pemerintah, yang diukur dengan pajak dan penerimaan-penerimaan lain, melebihi 25% dari total kegiatan ekonomi, maka yang terjadi adalah inflasi. Dasar yang dikemukakan adalah bahwa pajak yang tinggi akan mengurangi gairah kerja. Akibatnya produktivitas akan turun dengan sendirinya dan ini akan mengurangi penawaran agregate. Di lain pihak, pengeluaran pemerintah yang tinggi akan berakibat pada naiknya permintaan agregat.

Inflasi terjadi karena adanya keseimbangan baru yang timbul sebagai akibat adanya kesenjangan antara permintaan agregat dan penawaran agregat. Apabila batas 25 persen terlampaui maka akan timbul inflasi yang akan mempengaruhi social ekonomi masyarakat.

2.1.4.2.2 Teori Mikro

Tujuan dari teori mikro mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang menimbulkan permintaan akan barang publik dan faktor-faktor yang mempengaruhi tersedianya barang publik. Interaksi antara permintaan dan penawaran untuk barang publik menentukan jumlah barang publik yang akan disediakan melalui anggaran belanja. Jumlah barang publik

yang akan disediakan tersebut selanjutnya akan menimbulkan permintaan akan barang lain. Teori mikro mengenai pengeluaran pemerintah dapat dirumuskan sebagai berikut:

Penentuan Permintaan

$$U_i = f(G, X)$$

G = vektor dari barang publik

X = vektor barang swasta

I = individu; = 1, ..., m

U = fungsi utilitas

Seorang individu mempunyai permintaan akan barang publik dan swasta. Akan tetapi, permintaan efektif akan barang tersebut (pemerintah dan swasta) tergantung pada kendala anggaran (budget constraints). Misalkan seorang individu (i) membutuhkan barang publik (K) sebanyak G_k . Untuk menghasilkan i barang K sebanyak G_k , pemerintah harus mengatur sejumlah kegiatan. Misalnya pemerintah berusaha untuk meningkatkan penjagaan keamanan. Dalam pelaksanaan usaha meningkatkan keamanan tersebut tidak mungkin bagi pemerintah untuk menghapuskan sama sekali angka kejahatan. Karena itu, pemerintah dan masyarakat harus menetapkan suatu tingkat keamanan yang dapat ditolerir oleh masyarakat. Suatu tingkat

keamanan tertentu dapat dicapai dengan berbagai kombinasi aktivitas atau dengan menggunakan berbagai fungsi produksi.

Penentuan tingkat output

$$U_p = g(X, G, S)$$

Dimana :

U_p = fungsi utilitas

S = keuntungan yang diperoleh politisi dalam bentuk materi atau kedudukan

G = vektor barang public

X = vektor barang swasta

Kita asumsikan bahwa fungsi utilitas masyarakat diwakili seorang pemilih :

$$\text{Max } U_i = f(X, G)$$

Dengan pemuasan dibatasi kendala anggaran sehingga rumusnya:

$$P_x X + t B < M_i$$

Dimana :

P = vektor harga barang swasta

X = vektor barang swasta

B_i = basis pajak individu 1

M_i = total pendapatan individu 1

T = tariff pajak

Kurva permintaan dari pemilik yang mewakili masyarakat ditentukan oleh dua proses, yaitu dengan mengasumsikan pemilik tidak punya kemampuan mempengaruhi tarif pajak, sehingga dia bertindak sebagai pengambil harga (*Price Taker*). Atau, asumsikan kedua pemilik tidak bisa menentukan jumlah barang public, sehingga ia bertindak sebagai pengambil output (*Output Taker*).

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan hasil dari penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang berhubungan dengan permasalahan penelitian yang akan dilakukan penulis. Penelitian terdahulu menjadi acuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

No	Judul dan Penulis	Persamaan Variabel	Perbedaan Variabel	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Inflasi di	Menggunakan variabel terikat yang sama dan dua variabel	Menggunakan variabel bebas yang berbeda yaitu harga	Analisis Regresi Linier Berganda (Ordinary	Hasil Penelitian menunjukkan bahwa: - Jumlah Uang Beredar, Harga

	Indonesia Periode 2000- 2014. (Harjunata Y.T. Kalalo, Tri Oldy Rotinsulu, Mauna Th. B. Maramis. 2016)	bebas yang sama yaitu Jumlah Uang Beredar dan Nilai Tukar.	minyak dunia dan <i>BI rate</i>	Least Square Regression Analysis).	Minyak Dunia, Nilai Tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika secara nyata tidak berpengaruh terhadap Inflasi di Indonesia. - <i>BI Rate</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap Inflasi di Indonesia.
2.	Pengaruh Jumlah Uang Beredar dan Tingkat Suku Bunga serta Pengeluaran Pemerintah Terhadap Inflasi di Indonesia. (Nuri Agusmianata, Theresia Militina, Diana Lestari. 2017).	Menggunakan variabel terikat yang sama dan dua variabel bebas yang sama yaitu JUB dan Pengeluaran Pemerintah	Menggunakan variabel bebas yang berbeda yaitu tingkat suku bunga	Analisis regresi linier berganda fungsi Cobb- Douglas	Hasil Penelitian menunjukkan bahwa : - Jumlah Uang Beredar dan Tingkat Suku Bunga berpengaruh positif dan signifikan terhadap Inflasi di Indonesia - Pengeluaran Pemerintah berpengaruh negative dan signifikan terhadap Inflasi di Indonesia
3.	Analisis Dampak	Menggunakan variabel	Menggunakan variabel	Analisis jalur atau	Hasil penelitian menunjukkan

<p>Kebijakan Moneter Terhadap Jumlah Uang Beredar, Cadangan Devisa dan Laju Inflasi di Indonesia. (Rytia Yuki Fajarwati, Nyoman Djinar Setiawina. 2018).</p>	<p>terikat yang sama yaitu inflasi dan satu variabel bebas yang sama yaitu nilai tukar.</p>	<p>bebas yang berbeda yaitu giro wajib minimum dan BI <i>rate</i>, menggunakan dua variabel terikat lainnya yaitu cadangan devisa dan Jumlah Uang Beredar.</p>	<p><i>path analysis</i>.</p>	<p>bahwa :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kurs berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap laju Inflasi di Indonesia - Giro wajib minimum dan BI <i>rate</i> berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap laju Inflasi di Indonesia - Giro wajib minimum dan Kurs berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap jumlah uang beredar di Indonesia - BI <i>rate</i> berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap Jumlah Uang Beredar di Indonesia - Jumlah Uang Beredar berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Cadangan
--	---	--	------------------------------	--

					Devisa di Indonesia - BI rate berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Cadangan Devisa - Kurs berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap Cadangan Devisa di Indonesia.
4.	Pengaruh Faktor Ekonomi Terhadap Inflasi Yang Dimediasi Oleh Jumlah Uang Beredar. (Harda Putra Aprileven. 2015).	Menggunakan variabel terikat yang sama yaitu inflasi dan satu variabel bebas yang sama yaitu nilai tukar.	Menggunakan variabel bebas yang berbeda yaitu tingkat suku bunga dan variabel terikat lainnya yaitu JUB	Analisis regresi linier dan analisis jalur.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa : - Jumlah Uang Beredar, Kurs, dan tingkat suku bunga berpengaruh positif dan signifikan terhadap Inflasi - Kurs berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Jumlah Uang Beredar - Tingkat Suku Bunga Pinjaman berpengaruh negatif dan

				signifikan terhadap Jumlah Uang Beredar.
5.	Pengaruh Jumlah Uang Beredar dan Kurs Terhadap Tingkat Inflasi di Indonesia Sebelum dan Setelah Krisis Global 2008. (Hario Aji Hartomo. 2010).	Menggunakan variabel terikat yang sama dan dua variabel bebas yang sama yaitu JUB dan nilai tukar	Analisis regresi linier atau <i>ordinary least square</i> asumsi klasik.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa : - Jumlah Uang Beredar berpengaruh negatif terhadap tingkat Inflasi - nilai Kurs berpengaruh positif terhadap tingkat Inflasi, Tingkat Inflasi dipengaruhi oleh Jumlah Uang Beredar dan nilai Kurs, oleh karena Jumlah Uang Beredar dan Kurs perlahan bisa mempengaruhi Inflasi pada triwulan pertama tahun 2009 dan sedikit demi sedikit memecahkan masalah tentang krisis global sehingga Jumlah Uang Beredar dan

					Kurs menjadi sangat besar pengaruhnya terhadap Inflasi dan krisis ekonomi.
6.	Determinan Jumlah Uang Beredar dan Tingkat Inflasi di Indonesia Periode 1984-2014. (Ni LuhGede Ari Luwihadi, Sudarsana Arka. 2017).	Menggunakan variabel terikat yang sama yaitu inflasi dan variabel bebas yang sama yaitu nilai tukar.	Menggunakan variabel bebas yang berbeda yaitu suku bunga BI dan variabel terikat lainnya yaitu jumlah uang beredar.	Analisis jalur atau <i>path analysis</i> .	Hasil penelitian menunjukkan bahwa : - Suku Bunga BI berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Jumlah Uang Beredar, sedangkan Kurs Dollar Amerika berpengaruh positif dan signifikan terhadap Jumlah Uang Beredar - Suku Bunga BI dan Kurs Dollar Amerika berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat Inflasi sedangkan Jumlah Uang Beredar tidak berpengaruh signifikan terhadap

					tingkat Inflasi di Indonesia - Suku Bunga dan Kurs Dollar Amerika tidak berpengaruh secara tidak langsung terhadap tingkat Inflasi melalui Jumlah Uang Beredar.
7.	Analisis Pengaruh Jumlah Uang Beredar, Suku Bunga, Nilai Tukar Terhadap Inflasi di Indonesia tahun 1987-2016. (Iqbal Rahmana. 2017)	Menggunakan variabel terikat yang sama dan dua variabel yang sama yaitu JUB dan nilai tukar	Menggunakan variabel bebas yang berbeda yaitu tingkat bunga.	Analisis regresi linier berganda.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa : - Jumlah Uang Beredar, Suku Bunga, Nilai Tukar mempunyai pengaruh secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap Inflasi - Jumlah Uang Beredar, Suku Bunga dan Nilai Tukar berpengaruh secara parsial terhadap Inflasi, Inflasi dipengaruhi oleh Jumlah Uang Beredar - Suku Bunga,

					dan Nilai Tukar dan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain
8.	Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Inflasi di Indonesia tahun 2007-2012. (Kurniawan Saputra, Nugroho SBM. 2014).	Menggunakan variabel terikat yang sama dan dua variabel yang sama yaitu jumlah uang beredar dan nilai tukar.	Menggunakan variabel bebas yang berbeda yaitu tingkat bunga dan harga beras.	Analisis regresi linier berganda (OLS).	Hasil penelitian menunjukkan bahwa : - Jumlah Uang Beredar, Kurs dan Harga Beras secara individual berpengaruh signifikan terhadap tingkat Inflasi di Indonesia, sedangkan Suku Bunga tidak berpengaruh signifikan dalam mempengaruhi Inflasi di Indonesia - Jumlah Uang Beredar, Kurs Rp/US\$ dan harga beras mempunyai hubungan yang positif dan signifikan terhadap Inflasi di Indonesia - Suku Bunga mempunyai hubungan

					yang positif tetapi tidak signifikan terhadap Inflasi.
9.	Pengaruh Indikator Kebijakan Moneter Terhadap Inflasi di Indonesia. (Fatimah Zuhra. 2018)	Menggunakan variabel terikat yang sama dan satu variabel bebas yang sama yaitu jumlah uang beredar	Menggunakan variabel bebas yang berbeda yaitu suku bunga.	Analisis regresi linier berganda.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa : - Jumlah Uang Beredar dan suku bunga berpengaruh positif terhadap Inflasi di Indonesia.
10.	Analisis Pertumbuhan Ekonomi, Suku Bunga, Jumlah Uang Beredar, Harga Minyak Dunia dan Inflasi di Indonesia. (Taufiq C.Dawood, Emi Anjalía. 2017).	Menggunakan variabel terikat yang sama dan satu variabel bebas yang sama yaitu jumlah uang beredar	Menggunakan variabel bebas yang berbeda yaitu pertumbuhan ekonomi, suku bunga, dan harga minyak dunia.	<i>Vektor Autoregressive</i> (VAR)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa : - Inflasi dan SBI berpengaruh signifikan dan berhubungan positif terhadap Inflasi, sedangkan Jumlah Uang Beredar dan Harga Minyak Dunia berpengaruh tidak signifikan terhadap Inflasi - Pertumbuhan Ekonomi dan SBI berpengaruh signifikan dan

positif
terhadap
Inflasi.

2.3 Kerangka Pemikiran

Untuk mempermudah peneliti dalam penelitian, dimunculkan kerangka berpikir untuk menjelaskan analisis inflasi di Indonesia.

2.3.1 Hubungan Jumlah Uang Beredar dengan Inflasi

Berdasarkan persamaan Irving Fisher $M.V=P.T$, menunjukkan bahwa jumlah uang yang digunakan untuk membeli barang dan jasa, yaitu jumlah uang beredar (M) dikalikan berapa kali rata-rata uang tersebut berpindah tangan atau berputar dalam periode tersebut (V), adalah sama dengan jumlah uang beredar uang yang diterima dari penjualan barang dan jasa, yang merupakan hasil perkalian antara harga rata-rata barang tersebut (P) dengan jumlah transaksi yang terjadi (T). Menurut Irving Fisher, nilai V ditentukan oleh kebiasaan pembayaran gaji dan efisiensi operasi lembaga keuangan. Oleh karena faktor-faktor ini tidak selalu berubah, Fisher berpendapat nilai V adalah tetap. Dan T adalah jumlah barang dan jasa yang diproduksi dalam perekonomian dalam suatu periode tertentu yang ditentukan oleh tingkat output masyarakat (atau pendapatan nasional) dan bisa pula dianggap mempunyai nilai tertentu untuk suatu tahun.

Berdasarkan asumsi bahwa nilai V dan T adalah tetap, maka ahli-ahli ekonomi klasik berpendapat bahwa perubahan-perubahan dalam penawaran uang hanya akan mempengaruhi tingkat harga. Artinya bahwa perubahan dalam penawaran uang akan menyebabkan perubahan yang sama proporsinya dengan perubahan tingkat harga. Oleh karena itu dalam pandangan ahli ekonomi klasik, inflasi adalah disebabkan oleh ekspansi moneter atau akibat penambahan penawaran uang.

Dalam teori Fisher dikatakan inflasi terjadi ketika ada penambahan volume jumlah uang beredar baik dalam bentuk uang kartal maupun uang giral. Dan dengan kenaikan jumlah uang beredar ini akan membuat naiknya harga barang di pasaran. Dengan demikian maka hubungan jumlah uang beredar dan inflasi adalah positif.

2.3.2 Hubungan Nilai Tukar Dengan Inflasi

Dalam konsep paritas daya beli dikatakan bahwa nilai tukar antara dua negara seharusnya sama dengan rasio dari tingkat harga di kedua negara tersebut. Sehingga jatuhnya daya beli domestik pada suatu mata uang akan diikuti oleh depresiasi pada mata uang negara tersebut di pasar uang luar negeri. Namun jika yang terjadi adalah sebaliknya yaitu daya beli mengalami kenaikan maka akan diikuti oleh apresiasi pada mata uangnya. Paritas daya beli menunjukkan secara langsung bahwa perubahan nilai tukar mata uang berhubungan dengan perbedaan inflasi yang berlaku dari satu Negara ke Negara

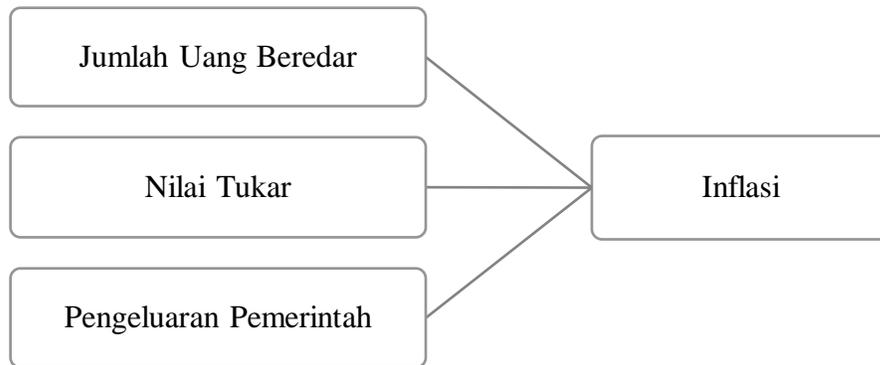
lain. Yang perlu ditekankan yaitu paritas daya beli memerlukan waktu yang cukup lama sehingga dikatakan bahwa teori ini menunjukkan hubungan keseimbangan jangka panjang antara nilai tukar dengan tingkat harga. Jika suatu mata uang mengalami apresiasi maka hubungan nilai tukar dan inflasi adalah positif dan jika mata uang mengalami depresiasi maka hubungannya adalah positif.

Hal ini sejalan dengan pendapat Prasojo (2003) yang menyatakan ketika nilai rupiah terdepresiasi maka harga barang-barang impor menjadi lebih mahal sehingga diperlukan rupiah yang lebih banyak guna untuk membeli barang impor tersebut.

2.3.3 Hubungan Pengeluaran Pemerintah dengan Inflasi

Collin Clark tentang batas kritis perpajakan mengatakan toleransi tingkat pajak dan pengeluaran pemerintah diperkirakan kurang dari 25 persen dari GNP meskipun anggaran belanja pemerintah tetap seimbang. Dan dikatakan bahwa jika kegiatan sektor pemerintah yang diukur dengan pajak dan penerimaan lain melebihi 25 persen dari total kegiatan ekonomi maka yang terjadi adalah inflasi. Pajak yang tinggi akan mengurangi gairah kerja yang akibatnya produktivitas akan turun dengan sendirinya dan ini akan mengurangi penawaran agregat. Pengeluaran pemerintah yang tinggi akan berakibat pada naiknya permintaan

agregat. Dengan demikian hubungan pengeluaran pemerintah dan inflasi adalah positif.



Gambar 2.6
Paradigma Penelitian

2.4 Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara dari masalah penelitian yang kebenarannya harus diuji secara empiris. Hipotesis merupakan suatu penjelasan dari beberapa masalah yang sedang dipelajari yang dapat dibenarkan atau dapat ditanggihkan.

Dari uraian permasalahan yang ada, maka dapat dikemukakan suatu hipotesis yang akan di uji kebenarannya dalam penelitian ini, yaitu :

1. Diduga Jumlah Uang Beredar, Nilai Tukar, dan Pengeluaran Pemerintah secara parsial berpengaruh positif terhadap Inflasi di Indonesia tahun 2008-2018.

2. Diduga Jumlah Uang Beredar, Nilai Tukar, dan Pengeluaran Pemerintah secara bersama berpengaruh positif terhadap Inflasi di Indonesia tahun 2008-2018

